

**JURNAL TINDAK LANJUT DAILY REPORT**  
**28 JANUARI S.D 1 FEBRUARI 2019**

<b>NO</b>	<b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH BERITA NEGATIF</b>	<b>SUDAH DITINDAK LANJUT</b>	<b>BELUM DITINDAK LANJUT</b>	<b>KET.</b>
1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	1	1		
2	Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	1		1	
3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	1	1		
4	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	1		1	
5	Dinas Kesehatan Kota Bekasi	1		1	
6	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	2	2		
7	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	1	1		
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	

DAILY REPORT MEDIA RIEW  
HUMAS SETDA KOTA BEKASI

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TOPE	WARTAWANI/ MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
TANGGAL BERITA : 29 Januari 2019 INPUT BERITA : 29 Januari 2019									
1	Rekayasa Lalin Dinilai Kurang Sosialisasi	BEKASI SELATAN - Rekayasa lalu lintas dengan melarang angkutan kota (angkot) dan ojek daring untuk menunggu dan menurunkan penumpang di Jalan Perjuangan, Kelurahan margamulya belum berjalan optimal. Berdasarkan pantauan Radar Bekasi, masih terdapat sejumlah pengemudi ojek daring yang berada di sekitaran Jalan Perjuangan, Senin (28/1). Meskipun, beberapa waktu lalu Dishub Kota Bekasi telah mengeluarkan kebijakan agar para pengemudi ojek daring menunggu penumpang di jalan Pusdiklat Raya. Salah satu pengemudi ojek daring, Ruli (32) mengatakan, ia tetap menunggu di Jalan raya Perjuangan karena mayoritas keuar dari pintu tersebut. "Intinya sih betul penumpang kurang disosialisasikan (soal) antar jemput ya di lokasi yang baru," katanya kepada Radar Bekasi, Senin (28/1). Ruli mengaku sempat berbincang dengan penumpangnya dan mengaku belum mendapatkan sosialisasi terkait hal itu. Ia juga menilal bahwa, jalan Pusdiklat relatif sempit untuk menunggu penumpang. Apalagi jika ditambah dengan angkot yang juga menunggu yang juga menunggu penumpang. Apalagi, jika ditambah dengan angkot yang juga menunggu penumpang di lokasi tersebut, "Prasarananya disana (Jalan Pusdiklat Raya) kurang, enggak bisa menampung ojol (ojek daring) yang ada disini, pintu keluar di sebelah sananya juga kecil," tukasnya	Dalops Dishub Kota Bekasi, Bambang, dan Pengemudi Ojek daring, Ruli (32)	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Rekayasa Lalin	Negatif	Radar Bekasi	1. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dengan Memasang rambu petunjuk jalan untuk angkutan umum 2. Sosialisasi dengan membagikan leaflet informasi manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada supir angkutan umum, ojek online, dan ojek pangkalan 3. Menugaskan Petugas Lalu Lintas Dishub Kota Bekasi di Sekitaran J. Diklat untuk memertancar Rekayasa Lalu Lintas	
2	Turap Saluran Irigasi Longsor Bahayakan Pengguna Jalan	BEKASI – Turap di sisi saluran Irigasi Jalan Rawatembaga, Kota Bekasi, Jawa Barat longsor. Kondisi ini mengancam jalan dan juga membahayakan pengguna jalan. Turap longsor juga menyebabkan trotoar berantakan dan masuk ke saluran. Pejalan kaki harus lebih berhati-hati karena harus menggunakan badan jalan. Ironisnya, tidak rambu ada penanda mengantisipasi pengguna jalan. Terlebih pengguna jalan di sini seringkali melaju kencang. "Sudah lama, ada kali sebulan longsornya," kata satu warga. Longsornya turap sebenarnya sudah diprediksi karena kondisi alas maupun tiang yang miring. Namun, belum sempat diperbaiki kemudian lebih dahulu longsor. Turap yang longsor menjadikan trotoar sepanjang sekitar 20 meter ikut ambrol. Lokasi longsor berada persis di belakang Islamic Center dan bersebelahan dengan Asrama Haji Bekasi. Belum diperoleh keterangan dari pejabat terkait dengan perbaikan turap ini. Hanya saja warga berharap perbaikan tidak lama. (chotim/b)	Salah satu warga	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	Infrastruktur	Negatif	Poekota News (Media Online)	Titik ini sudah di survey oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan akan dilaksanakan perbaikan pada tahun ini.	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TOPE	WARTAWAH/ MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
TANGGAL BERITA : 31 Januari 2019 INPUT BERITA : 31 Januari 2019									
1	Kadishub Cuek Soal Parkir Jalan RS Bhakti Kartini	<p>persoalan penanggulangan kemacetan ruas jalan di sejumlah ruas jalan di wilayah kota Bekasi memang sangat kronis. Apalagi, tidak kooperatifnya petugas berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Yayan Yuliana yang pelit bicara ketika dikonfirmasi Metro Bekasi.</p> <p>Ketidak kooperatifan sang kepala dinas terlihat saat metro Bekasi mengkonfirmasi terkait pemberitaan pemberitaan ruas jalan RA. Kartini akibat parkir bahu jalan RS Bhakti Kartini. Namun, telepon dan pesan melalui WhatsApp yang disampaikan justru diabaikan.</p> <p>Ketua Divisi Investigasi Distrik Kota Bekasi, Delvin Chaniago saat dimintai tanggapannya menilai, sebagai sebagai seorang kepala OPD mestinya Kepala Dishub bisa berkomunikasi aktif dengan awak media. Apalagi, persoalan itu menyangkut tugas pokok dan fungsi pada dinas yang dia pimpin.</p>	Yayan Yuliana, Ketua Divisi Investigasi GMBI Distrik Kota Bekasi Delvin Chaniago, roni pengguna jalan.	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	Parkir Liar	Negatif	Metro Bekasi (Media Cetak)	Kami akan berkoordinasi dengan UPTD parkir terkait untuk menertibkan parkir liar yang ada di lokasi tersebut dan juga akan berkoordinasi dengan pihak RS Bhakti Kartini untuk menyiapkan lahan parkir yang memadai.	
2	Sidak KVA hanya Isapan Jempol Belaka	<p>persoalan sertifikat laik fungsi (SLF) pada bangunan gedung Kemang View Apartement ( KVA ) sepertinya terabaikan. Jajaran pemerintah baik dari eksekutif maupun legislatif yang ada di Kota Bekasi seolah tidak mau tahu soal keselamatan warganya yang tinggal di gedung milik Takke Group.</p> <p>Hampir 2 bulan lamanya senak peristiwa kebakaran yang meresahkan penghuni apartement di daerah kelurahan pekarayan jaya, belum ada upaya tega dari pemerintah. bahkan, leading sektor dari dinas terkait terkesan tutup mata akan peristiwa tersebut.</p>	Kepala Seksi Penataan Ruang Distrik Kota Bekasi Kusnadi.	Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Sertifikat Laik Fungsi	Negatif	Metro Bekasi (Media Cetak)		
4	Warga Keluhkan Polusi Debu	<p>METROBEKASI.NET – Sejumlah warga Kota Bekasi mengeluhkan banyaknya debu. Hal ini terjadi karena banyaknya aktivitas kendaraan serta truk tanah yang hilir mudik di kota yang dijuluki Kota Patriot ini.</p> <p>Sudiyanto, warga Perumahan Bulak Kapal Permai, Bekasi Timur, misalnya kerap mengeluhkan banyaknya debu yang terangkut ke udara setiap dirinya melintasi sejumlah jalan di Kota Bekasi.</p> <p>"Setiap pagi saya melewati jalan dan kebetulan banyak sisa tanah tertinggal di jalanan yang dibawa oleh truk tanah yang melintas untuk pembangunan sejumlah proyek di Kota Bekasi dan hal ini cukup mengganggu," kritiknya sambil mengerutkan dahi.</p> <p>Bukan hanya sampai disitu saja, beberapa hari yang lalu dirinya juga tergelincir akibat cecceran tanah yang ada di jalan.</p> <p>"Kebetulan beberapa hari yang lalu setelah hujan, saya sempat tergelincir karena cecceran tanah di jalan," tambahnya.</p> <p>Senada dengan Sudiyanto, Mustofiah, juga mengeluhkan tidak adanya pembatasan jam atau waktu melintas bagi kendaraan proyek, khususnya truk tanah, hal ini bisa mengakibatkan polusi debu akibat cecceran tanah yang dilinggalkan oleh mereka ketika melintas.</p> <p>"Seharusnya ada waktu-waktu tertentu bagi truk tanah tersebut melintas, sehingga tidak menimbulkan polusi debu," terangnya.</p>	Sudiyanto dan Mustofiah, warga Perumahan Bulak Kapal Permai	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	Polusi	Negatif	Metro Bekasi (Media Online)	sudah dilakukan pengujian kualitas udara ambient di jalan raya sebanyak 25 titik selama 2 periode. hasilnya ada beberapa titik yang melibihi baku mutu tapi indeks kualitas udara (IKU) kota Bekasi masih baik	

NO	JUDUL	ISI BERITA	NARASUMBER	DINAS	ISU	TOPE	WARTAWAH/ MEDIA	TINDAKLANJUT	KET.
5	Ketua AWPI DPC Bekasi Raya Pertanyakan Rincian Biaya Penggunaan KS-NIK	KETUA Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bekasi Raya, M Lengkong, mempertanyakan rincian biaya penggunaan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) kepada Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto. Pertanyaan itu disampaikan saat menghadiri acara 'diskusi santai' yang digelar Koran Bekasi di Graha Hartika, Rabu (30/1). Dia juga meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi transparan terkait penggunaan anggaran KS-NIK selama ini. Menurut dia, program tersebut belakangan ini hangat menjadi topik pembahasan di berbagai kalangan masyarakat. "Barangkali dirasa sangat baik kebijakannya oleh banyak orang, bahkan dianggap sangat membantu warga Kota Bekasi, dalam hal pelayanan dasar yang harus terpenuhi. Namun, dipertanyakan transparansinya," kata Lengkong. Menurut dia, banyak yang mengapresiasi terkait adanya Program Kartu Sehat, namun bagaimana langkah Pemerintah Kota Bekasi kedepan agar lebih transparan perihal penggunaan anggarannya. Diantaranya mengenai informasi rincian biaya bagi warga Kota Bekasi yang menjadi pasien menggunakan KS	KETUA Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bekasi Raya, M Lengkong	Dinas Kesehatan Kota Bekasi	Kartu Sehat	Negatif	Koran Bekasi (Media Online)		
6	Pulhan Lapak Berdiri Diatas Jalan dan Disewakan Oleh Oknum	TransparanNews, BEKASI – Masyarakat sesialkan fasum berupa jalan umum di pertokoan Juanda Kota Bekasi tepatnya dijadikan lapak (kios) oleh oknum berinisial JH dengan harga sewa kisaran Rp.3 Juta sampai Rp.5 Juta per tahun. Dari keterangan yang berhasil dihimpun transparannews.com di lokasi, bahwa lapak yang berjumlah kurang lebih 50 Unit tersebut sudah bertahun-tahun dikelola oleh oknum JH. Dan kuat dugaan oknum JH bekerjasama dengan oknum pegawai pemerintah kota Bekasi, sehingga lapak tersebut bisa berdiri permanen. Menurut keterangan salah satu narasumber (penyewa lapak, namanya tidak bersedia disebutkan-red), setiap tahun oknum JH dapat mengumpulkan uang sewa lapak dengan rata-rata Rp.4 juta dikali 50 Unit kurang lebih sebesar Rp.200 juta dan uang tersebut diduga masuk kantong pribadi oknum-oknum. Selain itu, dari keterangan warga penyewa lapak dan warga sekitar bahwa oknum JH juga mengelola parkir masuk pertokoan tersebut, dan diduga kuat banyak menguap mengingat potensi (lalu lalang kendaraan keluar masuk) sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi dari retribusi parkir khusus pertokoan tersebut tidak maksimal. Hal itu karena pihak pengelola diduga tidak transparan terkait hasil yang didapat setiap harinya.	warga penyewa lapak dan warga sekitar	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Lapak Liar	Negatif	Transparan News (Media Online)	terima kasih atas informasinya, dengan ini kami sampaikan, mengenai oknum JH yang melakukan penyewaan lapak liar di pertokoan Juanda, yang berwenang menindaklanjuti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, selanjutnya apabila diputuskan untuk di bongkar, maka kami Satpol PP Kota Bekasi menunggu instruksi Wali Kota Bekasi untuk melakukan pembongkaran dan penertiban kios/lapak liar di pertokoan tersebut.	
TANGGAL BERITA : 01 Februari 2019									
INPUT BERITA : 01 Februari 2019									
1	Kadisdik Kota Bekasi Diduga Menyalahgunakan Wewenang	REAKSI BEKASI - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, patut diduga menyalahgunakan, wewenang dalam merealisasikan Dana Bantuan Operasional Sekolah daerah (Bosda) tahun anggaran 2017 untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah swasta se-Kota Bekasi. Penanma Dana Bos untuk SMP dan MTs swasta yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota (Kepwal) Bekasi nomor : 421/Kep.445.A-Disdik/IX/2017 adalah sebanyak 289 sekolah se-Kota Bekasi. Didalam Kepwal Bekasi nomor : 421/Kep.445.A-Disdik/IX/2017 tersebut, sudah jelas diterangkan berapa jumlah sekolah dan jumlah Rupiah pada kepalw tersebut, namun realisasi pencairannya diduga melebihi dari kepalw yang sudah ditetapkan. Untuk mengkonfirmasi terkait realisasi dan Bosda tahun 2017 yang diduga tidak sesuai kepalw 25 September 2017 tersebut, pada Kamis (31/1/17) ketiga kalinya tim Reaksi menemui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi di ruangannya, namun kembalikan berhasil memenuhinya. Salah satu staf Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengatakan "Sapak lagi sibuk rapat degan guru-guru."		Dinas Pendidikan Kota Bekasi	BOSDA	Negatif	Reaksi Nasional		